

RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBANGUNAN EKONOMI RURAL DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KELURAHAN KUIN UTARA BANJARMASIN

Nike Purnamawati¹, Safa Muzdalifah², Farid Nofiard³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*Email: *Nike.purnawati@ulm.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi rural di Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin. Pengembangan desa wisata merupakan strategi pembangunan yang berbasis potensi lokal dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden yang tinggal di wilayah terdampak kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kebijakan tersebut, terutama terkait dengan peluang ekonomi seperti pembukaan usaha, lapangan kerja baru, dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis skala Guttman yang menunjukkan persepsi positif masyarakat (87%) terhadap kebijakan perubahan lahan permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum mendukung kebijakan ini dari aspek ekonomi. Namun demikian, masih terdapat kekhawatiran terkait pengalihan fungsi lahan dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial. Temuan ini mengindikasikan pentingnya pendekatan partisipatif dan komunikasi kebijakan yang intensif dari pemerintah agar pengembangan desa wisata dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Kebijakan Pemerintah, Desa Wisata, Ekonomi Rural.

Abstract

This study aims to determine public perceptions of local government policies in developing tourism villages and their implications for rural economic development in Kuin Utara Village, Banjarmasin City. Tourism village development is a development strategy based on local potential and aims to improve community welfare through the tourism sector. The approach used in this study is quantitative descriptive, with data collection techniques through questionnaires distributed to 100 respondents living in areas affected by the policy. The results of the study indicate that most people have a positive perception of the policy, especially related to economic opportunities such as opening businesses, new jobs, and increasing household income. Based on the results

of the Guttman scale analysis which shows a positive public perception (87%) of the policy of changing residential land into the North Kuin Tourism Village, it can be concluded that the public generally supports this policy from an economic aspect. However, there are still concerns regarding land conversion and its impact on social sustainability. These findings indicate the importance of a participatory approach and intensive policy communication from the government so that tourism village development can run inclusively and sustainably.

Keywords: *Public Perception, Government Policy, Tourism Village, Rural Economy.*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan berbasis potensi lokal, salah satunya melalui kebijakan pengembangan desa wisata. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan daya tarik wilayah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi rural, terutama di wilayah yang memiliki nilai budaya, sejarah, dan geografis yang unik seperti Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin. Transformasi lahan dari fungsi permukiman menjadi kawasan wisata merupakan bentuk kebijakan spasial dan ekonomi yang memerlukan dukungan dan penerimaan dari masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi di lapangan (Sumaryadi, 2010; Wahyudi, 2020).

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui kebijakan pengembangan desa wisata sebagai strategi revitalisasi ekonomi lokal. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga menuntut partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Transformasi fungsi lahan permukiman menjadi kawasan wisata merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan yang membawa implikasi luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya Purnamawati, N., & Fauzi, E. A. (2024). Oleh karena itu, kajian terhadap persepsi masyarakat menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterima dan mampu mencapai tujuannya sebagai respons terhadap

tuntutan pembangunan ekonomi. Kebijakan pengembangan desa wisata di Kuin Utara merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata. Namun, perubahan ini seringkali menimbulkan pro dan kontra di tingkat masyarakat, terutama terkait dengan dampak ekonomi seperti kesempatan kerja, redistribusi pendapatan, dan perubahan mata pencaharian. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat memandang kebijakan ini agar implementasinya dapat berjalan secara efektif.

Aspek ilmu pemerintahan menjadi relevan dalam penelitian ini dikarenakan kebijakan perubahan lahan melibatkan peran pemerintah dalam perencanaan, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Di Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin, wacana pengembangan desa wisata terus digalakkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal, seperti budaya sungai, warisan sejarah, dan kearifan lokal. Namun, implementasi kebijakan ini turut menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan pengalihan fungsi lahan permukiman. Situasi literasi di desa-desa di Indonesia mencerminkan tantangan yang kompleks, terkait dengan tingkat pendidikan, akses terhadap sumber daya, dan infrastruktur. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal pendidikan dan literasi sangat mencolok. Desa-desa di Indonesia sering kali menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi peningkatan literasi, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas hidup dan peluang ekonomi penduduknya (Prayitno, 2024). Dalam konteks Kuin Utara, faktor sosial budaya seperti keterikatan masyarakat dengan lahan permukiman tradisional dan harapan terhadap manfaat ekonomi dari desa wisata perlu dikaji secara mendalam. Pendekatan multidisiplin ini akan membantu memahami kompleksitas dampak kebijakan dari berbagai perspektif.

Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh minimnya studi yang mengkaji persepsi masyarakat terhadap konversi lahan permukiman menjadi desa wisata, khususnya di wilayah rural perkotaan seperti Banjarmasin. Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak lingkungan atau pariwisata secara umum, tanpa mengeksplorasi secara mendalam aspek ekonomi rural dan pandangan masyarakat. Padahal, persepsi masyarakat merupakan kunci keberhasilan suatu kebijakan pembangunan. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang ada sekaligus memberikan masukan bagi pembuat kebijakan. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat penting dan perlu diperhatikan, dalam hal ini pariwisata berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena terdapat wisatawan yang mengunjungi daerah pariwisata tersebut untuk melakukan rekreasi dengan segala kebutuhannya, sehingga daerah pariwisata memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang secara langsung menjadi kesempatan bagi mereka dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi Tholhah, T., & Alamari, M. F. (2022). Aspek sosial pemerintahan dalam kebijakan ini terlihat dari bagaimana pemerintah mengelola komunikasi publik, partisipasi warga, dan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif. Persepsi masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pendekatan partisipatif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Jika masyarakat merasa dilibatkan dan memperoleh manfaat ekonomi secara nyata, maka potensi konflik dapat ditekan dan tujuan pembangunan desa wisata dapat tercapai dengan lebih berkelanjutan.

Perubahan fungsi lahan dari permukiman menjadi desa wisata di Kelurahan Kuin Utara merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang memunculkan persepsi beragam dari masyarakat.

Pengembangan mengacu pada upaya untuk meningkatkan atau memperluas suatu hal yang sudah ada, baik itu infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, atau sector lainnya. Pengembangan sering kali dilakukan dalam konteks pembangunan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, meningkatkan daya saing, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengarahkan dan mendorong pengembangan melalui kebijakan yang mendukung inovasi, investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sector ekonomi Kurniati, P. S., Zakiyani, S. N., Yuwono, F. A. N., & Munigar, W. (2023). Sejumlah warga mungkin melihat peluang ekonomi baru dari sektor pariwisata, sementara yang lain justru merasa kehilangan ruang hidup atau mengalami ketidakpastian atas status lahannya.

Beberapa penelitian terkini juga telah mengeksplorasi dinamika perubahan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengembangan wisata seiring dengan berjalannya waktu. Studi longitudinal yang dilakukan Kurniawati et al. (2021) di Desa Wisata Pentingsari Yogyakarta menemukan bahwa persepsi masyarakat mengalami pergeseran signifikan dari fase awal pengembangan hingga fase konsolidasi, dengan tingkat optimisme yang fluktuatif mengikuti kurva adaptasi terhadap perubahan.

Desa wisata dengan segala aspeknya, tidak lepas dari kearifan lokal yang ada di dalam sosial ekonominya. Kearifan lokal adalah sintesa budaya yang dihasilkan oleh pelaku lokal melalui proses yang literatif. Sintesis budaya ini dicapai dengan internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya, yang kemudian disosialisasikan dalam bentuk norma dan dijadikan aturan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Purnamawati & Fauzi, 2023). Sehingga desa wisata dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebijakan publik yang berlaku di dalamnya. Teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi fondasi utama untuk memahami keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan lahan permukiman menjadi desa wisata. Teori ini berpijak pada pandangan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif hanya dapat tercapai apabila

masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan (Arnstein, 1969).

Beberapa studi empiris telah mengeksplorasi dinamika aspek ekonomi rural dalam pengembangan desa wisata dengan berbagai pendekatan dan konteks. Penelitian yang dilakukan oleh Pudianti et al. (2018) di desa wisata Jawa Tengah mengungkapkan bahwa transformasi ekonomi rural melalui pengembangan desa wisata berlangsung dalam tiga fase: fase inisiasi yang ditandai dengan munculnya usaha rintisan pariwisata, fase konsolidasi dengan terbentuknya jejaring ekonomi lokal, dan fase matang dengan terintegrasinya ekonomi pariwisata ke dalam struktur mata pencaharian masyarakat. Studi ini juga menemukan bahwa rumah tangga yang mampu mengkombinasikan aktivitas pertanian dengan usaha pariwisata cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan yang sepenuhnya beralih ke sektor pariwisata. Sejalan dengan temuan tersebut, Liu et al. (2017) dalam penelitiannya di pedesaan Tiongkok menemukan fenomena "pluriactivity" sebagai strategi adaptif rumah tangga petani dalam merespon peluang ekonomi dari pengembangan desa wisata, di mana diversifikasi pendapatan menjadi kunci resiliensi ekonomi menghadapi fluktuasi kunjungan wisatawan dan ketidakpastian pasar.

Di Indonesia, studi Rosalina et al. (2021) di Desa Wisata Tinalah, Yogyakarta, menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal mampu menciptakan "value-added economy" melalui komodifikasi produk budaya dan kuliner tradisional yang sebelumnya hanya memiliki nilai guna menjadi komoditas ekonomi bernilai tukar tinggi. Temuan ini diperkuat oleh Putra et al. (2020) yang meneliti dampak ekonomi pengembangan desa wisata di Bali dan mengidentifikasi bahwa desa wisata yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan inovasi ekonomi kreatif mampu menciptakan "premium economic positioning" yang meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi lokal. Meskipun demikian, studi Muzha et al. (2019) di beberapa desa wisata di Jawa Timur

mengingatkan bahwa tanpa mekanisme redistribusi yang efektif dan pengembangan kapasitas yang inklusif, ekonomi desa wisata berisiko menciptakan kesenjangan baru antara kelompok yang mampu memanfaatkan peluang pariwisata dan yang tidak, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan ekonomi rural yang berpihak pada keadilan distribusi manfaat dan keberlanjutan sosioekonomi masyarakat.

Kelurahan Kuin Utara yang terletak di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin memiliki karakteristik unik sebagai kawasan permukiman tradisional yang mengalami transformasi menjadi destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Menurut studi yang dilakukan oleh Hartatik et al. (2019), Kuin Utara merupakan salah satu kawasan bersejarah di Kota Banjarmasin dengan keberadaan Masjid Sultan Suriansyah sebagai situs peninggalan Kesultanan Banjar yang menjadi embrio pengembangan pariwisata di wilayah tersebut. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa struktur permukiman tradisional di sepanjang tepian Sungai Kuin dengan rumah-rumah panggung dan pola kehidupan masyarakat yang masih kental dengan tradisi sungai menjadi potensi utama dalam pengembangan desa wisata berbasis budaya dan ekologi sungai. Sejalan dengan temuan tersebut, kajian Bappeda Kota Banjarmasin (2018) menyoroti bahwa Kelurahan Kuin Utara ditetapkan sebagai salah satu zona konservasi budaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin 2013-2032, di mana kebijakan pengembangan desa wisata merupakan bagian dari strategi pelestarian nilai-nilai budaya Banjar sekaligus upaya revitalisasi ekonomi kawasan tepian sungai yang mulai termarginalisasi oleh pembangunan perkotaan. Nasrullah et al. (2021) dalam penelitiannya tentang pola pengembangan wisata sungai di Kota Banjarmasin mengidentifikasi bahwa Kelurahan Kuin Utara menjadi salah satu destinasi unggulan dalam jalur wisata susur sungai yang menghubungkan berbagai atraksi wisata seperti Pasar Terapung, kampung sasirangan, dan kawasan kuliner tradisional, sehingga memiliki posisi strategis dalam ekosistem pariwisata Kota Banjarmasin.

Implementasi kebijakan pengembangan desa wisata di Kelurahan Kuin Utara tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan kontekstual. Penelitian Rahmini et al. (2020) mengungkapkan bahwa transformasi Kuin Utara menjadi desa wisata dihadapkan pada dilema antara tuntutan modernisasi infrastruktur wisata dengan upaya mempertahankan otentisitas lingkungan dan budaya setempat. Studi tersebut mengidentifikasi adanya kesenjangan persepsi antara pemerintah kota yang cenderung berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan masyarakat lokal yang lebih mementingkan pelestarian nilai-nilai tradisional dan peningkatan kualitas hidup penduduk. Hal ini diperkuat oleh temuan Hasan et al. (2022) yang menunjukkan adanya pergeseran pola pemanfaatan ruang di Kelurahan Kuin Utara, di mana sebagian lahan permukiman tradisional bertransformasi menjadi fasilitas pendukung wisata seperti homestay, warung kuliner, dan sentra kerajinan yang mayoritas dikelola oleh investor dari luar kawasan. Akibatnya, sebagaimana diungkapkan oleh Apriyanti dan Widodo (2019), terjadi kenaikan harga lahan yang signifikan di kawasan tersebut, mendorong sebagian penduduk asli untuk menjual properti mereka dan berpindah ke pinggiran kota. Di sisi lain, Hidayat et al. (2021) melalui studi mereka tentang model pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kuin Utara menemukan adanya inisiatif positif dari komunitas lokal dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut, antara lain melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), koperasi usaha wisata, dan pelatihan keterampilan pariwisata yang melibatkan generasi muda setempat.

Seiring dengan meningkatnya tren pengembangan desa wisata sebagai strategi pembangunan berkelanjutan, studi mengenai persepsi masyarakat menjadi semakin penting, khususnya dalam menilai sejauh mana kebijakan pemerintah dapat diterima secara sosial dan berdampak secara ekonomi. Dalam konteks ekonomi rural, keberadaan desa wisata diharapkan mampu membuka peluang kerja, mendukung usaha mikro lokal, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat komunitas (Yuliani, 2018). Namun, jika

kebijakan ini tidak disertai dengan pendekatan partisipatif dan komunikasi yang efektif, maka dapat menimbulkan resistensi atau ketidakpuasan dari warga.

Penelitian ini memiliki urgensi karena berfokus pada evaluasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa wisata dan dampaknya pada pembangunan ekonomi rural di Kelurahan Kuin Utara. Hal ini krusial untuk menilai penerimaan sosial dan dampak ekonomi kebijakan tersebut, mengingat pengembangan desa wisata adalah strategi pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung usaha mikro lokal, dan mendorong perputaran ekonomi komunitas. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah fokus yang lebih mendalam pada persepsi masyarakat terhadap konversi lahan permukiman menjadi desa wisata di wilayah rural perkotaan, suatu aspek yang kurang dieksplorasi dalam studi-studi terdahulu yang lebih umum membahas dampak lingkungan atau pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur dan memberikan masukan penting bagi pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa wisata, serta mengkaji dampaknya terhadap pembangunan ekonomi rural di Kelurahan Kuin Utara melalui pendekatan kuantitatif deskriptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi rural untuk menganalisis dampak kebijakan perubahan lahan permukiman menjadi desa wisata terhadap kondisi perekonomian masyarakat di Kelurahan Kuin Utara. Fokus utama dalam ekonomi rural meliputi pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, distribusi manfaat ekonomi, serta perubahan pola mata pencaharian akibat pengembangan sektor pariwisata. Dengan sudut pandang ini, penelitian bertujuan mengukur sejauh mana kebijakan desa

wisata mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat rural, sekaligus mengidentifikasi tantangan seperti ketimpangan akses atau dampak terhadap sektor tradisional.

Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner terstruktur yang menyasar responden dari berbagai kelompok masyarakat, seperti pelaku usaha lokal, pekerja, dan pemilik lahan. Data yang dihasilkan akan diolah secara statistik untuk menggambarkan trend persepsi masyarakat terhadap kebijakan desa wisata, termasuk tingkat penerimaan, harapan ekonomi, dan kekhawatiran yang muncul. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif dan terukur mengenai dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Populasi penelitian adalah masyarakat Desa Kuin Utara yang memiliki karakteristik terdampak kebijakan perubahan lahan permukiman menjadi desa wisata Kuin Utara, dan telah memahami persoalan. Jumlah penduduk desa Kuin Utara adalah 11.886 orang, menggunakan metode penarikan sampel teknik nonprobability sampling, dengan secara khusus adalah purposive sampling (penentuan sampling berdasarkan pertimbangan tertentu). Untuk meningkatkan validitas penelitian, proporsional sampling diterapkan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi proporsi setiap kelompok pekerjaan dalam populasi sesungguhnya di Kelurahan Kuin Utara, kemudian menentukan jumlah responden dari masing-masing kategori pekerjaan sesuai proporsinya.

Berikut ini tahapan penarikan sampel penelitian:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

E = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir;

e= 0,1

11886

$$n = \frac{1 + 11886 \times (0.01)}{1}$$

$$= 99,1$$

$$= 100$$

Sampel Penelitian diperoleh 100 responden penelitian.

Karakteristik responden penelitian diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin dan jenis pekerjaan, data ditunjukkan melalui Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah
Perempuan	58
Laki-Laki	42

Sumber: Data Penelitian di Lapangan

Tabel 2. Jumlah Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah
Pedagang	29
Swasta	19
Buruh Lepas	12
Ibu Rumah Tangga	29
Wiraswasta	6
PNS	2
Guru Honorer	1
Apoteker	1
Mahasiswa	7
Jumlah	100

Sumber: Data Penelitian di Lapangan

Pada Tabel 2, yang menampilkan jumlah jenis pekerjaan responden, terdapat kebutuhan untuk menguraikan lebih lanjut penghitungan jumlah sampelnya, khususnya dengan pendekatan

stratified purposive sampling. Meskipun penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan purposive sampling untuk mendapatkan total 100 responden, tidak ada penjelasan rinci mengenai bagaimana proporsi atau alokasi responden untuk setiap jenis pekerjaan ditentukan. Data menunjukkan sebaran responden seperti Pedagang (29), Swasta (19), Buruh Lepas (12), Ibu Rumah Tangga (29), Wiraswasta (6), PNS (2), Guru Honorer (1), Apoteker (1), dan Mahasiswa (7).

Penerapan stratified purposive sampling akan lebih tepat dan kuat dalam konteks ini, dikarenakan justifikasi yang jelas mengenai proporsi ini, terutama jika tidak berdasarkan data demografi populasi Kuin Utara sesuai dengan metode ini karena memungkinkan peneliti untuk membagi populasi Kelurahan Kuin Utara ke dalam strata atau lapisan berdasarkan jenis pekerjaan. Setelah strata terbentuk, responden kemudian dipilih secara sengaja (purposif) dari setiap strata berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya individu yang terlibat langsung atau terdampak kebijakan pengembangan desa wisata. Dengan demikian, peneliti dapat memastikan bahwa semua kelompok pekerjaan yang dianggap krusial untuk memahami persepsi masyarakat terwakili secara memadai dalam sampel, meskipun pemilihan dalam setiap strata tetap non-acak. Hal ini akan meningkatkan validitas internal dan eksternal penelitian, memastikan bahwa temuan mengenai persepsi masyarakat terhadap dampak ekonomi rural lebih komprehensif dan representatif.

Skala yang digunakan adalah skala Guttman karena bersifat tegas dan konsisten dengan memberikan jawaban yang tegas dengan jawaban dari pertanyaan ya dan tidak. Penilaian yang diberikan dengan skor 1 untuk jawaban ya dan skor 0 untuk jawaban tidak. Setelah dilakukan skoring kemudian pertanyaan tersebut dihitung dengan cara persentase (%) jawaban

pertanyaan, untuk mengetahui pengetahuan dari responden maka dengan menggunakan kriteria absolute:

$$P = a/b \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase

a : jumlah pertanyaan benar

b : jumlah semua pertanyaan

Berikut skor jawaban berdasarkan skala Guttman ditunjukkan melalui Tabel 1:

Tabel 3. Skala Guttman

Katagori	Skor
Ya	1
Tidak	0

Sumber: Penetapan oleh Peneliti

Rentang skala 0,00 – 0,65 dinilai negative

Rentang skala 0,66 – 1 dinilai positif

Teknis analisis yang digunakan adalah analisis parsial perindikator, yaitu teknik yang dilakukan pada dsetiap indikator peneliti engan mengajukan sejumlah pertanyaan, untuk mengetahui skor tertinggi dan terendah maka, bobot jawaban dikali jumlah pertanyaan kemudian dikali jumlah responden, yaitu:

Skor Tertinggi:

= Bobot Jawaban YA x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Skor Terendah:

= Bobot Jawaban TIDAK x Jumlah Pertanyaan, x Jumlah Responden

Analisis data kuantitatif akan mencakup distribusi frekuensi, persentase, dan uji statistik sederhana (seperti uji mean atau skala Likert) untuk mengukur tingkat persetujuan atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan. Selain itu, penelitian ini dapat memanfaatkan analisis komparatif

untuk membandingkan kondisi ekonomi sebelum dan setelah implementasi kebijakan, atau membandingkan kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan dalam konteks ekonomi rural. Secara keseluruhan, sudut pandang ekonomi rural dengan metode kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai dampak kebijakan desa wisata terhadap perekonomian lokal. Temuan ini tidak hanya berguna bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat dan investor untuk memahami peluang serta risiko pengembangan desa wisata di kawasan rural-perkotaan seperti Kuin Utara.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Persepsi Masyarakat terhadap Perubahan Lahan Permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara berdasarkan Aspek Ekonomi

Hasil penelitian mengenai "Persepsi Masyarakat terhadap Perubahan Lahan Permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara berdasarkan Aspek Ekonomi" menunjukkan bahwa transformasi kawasan permukiman menjadi desa wisata telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi penduduk setempat, dimana mayoritas responden menyatakan adanya peningkatan kesempatan kerja dan diversifikasi sumber pendapatan melalui usaha kuliner, kerajinan, dan layanan wisata yang berkembang sejak penetapan status desa wisata; selain itu, terjadi kenaikan nilai properti dan lahan yang memberikan keuntungan bagi pemilik tanah asli, meskipun beberapa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalami kesulitan mengakses perumahan akibat gentrifikasi, serta tercatat adanya distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata di antara berbagai segmen masyarakat, dengan keuntungan lebih besar dinikmati oleh pemilik usaha dan properti, sementara pekerja pariwisata musiman masih menghadapi ketidakstabilan pendapatan, sehingga menimbulkan persepsi beragam di kalangan

penduduk tentang keberlanjutan model pengembangan wisata yang diterapkan di Kuin Utara. Berikut adalah penjelasan hasil kuisisioner lapangan penelitian ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Persepsi Masyarakat berdasarkan Aspek Ekonomi Rural

No	Pertanyaan (P)	Jawaban Ya		Jawaban Tidak	
		Jumlah Orang	Persen	Jumlah Orang	Persen
1	Kebijakan desa wisata Kuin Utara membantu perekonomian warga sekitar	86	86%	14	14%
2	Kebijakan desa wisata mampu mengurangi jumlah pengangguran\ mengurangi kesulitan mencari pekerjaan	88	88%	12	12%
3	Kebijakan desa wisata Kuin Utara berhasil memberdayakan masyarakat sekitar secara ekonomi	85	85%	15	15%
4	Masyarakat setempat adalah masyarakat yang paling banyak memperoleh manfaat dari desa wisata.	91	91%	9	9%
5	Kebijakan Desa Wisata Kuin Utara mendorong ekonomi hasil kearifan lokal	88	88%	12	12%
6	Kebijakan desa wisata Kuin Utara tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi	80	80%	20	20%
7	Kebijakan desa wisata Kuin Utara tidak hanya dinikmati masyarakat dari luar wilayah wisata	88	88%	12	12%
	Rata-Rata	86,6		13,4	

Sumber: Survei Lapangan 2024

Tabel 4 menunjukkan persepsi Masyarakat terhadap Perubahan kebijakan lahan permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara yaitu pada P1 terdapat 86% responden menilai kebijakan tersebut mampu membantu

perekonomian warga sekitar dan 14% responden menjawab tidak mampu membantu perekonomian warga sekitar, pada P2 terdapat 88% responden menilai kebijakan tersebut mampu mengurangi jumlah pengangguran/ mengurangi kesulitan mencari pekerjaan dan 12% responden menilai tidak mampu mengurangi jumlah pengangguran/ mengurangi kesulitan mencari pekerjaan, pada P3 terdapat 85% responden menilai bahwa kebijakan berhasil memberdayakan Masyarakat secara ekonomi dan 15% responden menilai tidak berhasil memberdayakan Masyarakat secara ekonomi, pada P4 terdapat 91% responden menilai kebijakan tersebut dinilai masyarakat setempat yang paling banyak memperoleh manfaat dari desa wisata, dan 9% responden menilai masyarakat setempat bukan yang paling banyak memperoleh manfaat dari desa wisata, pada P5 terdapat 88% responden menilai bahwa Kebijakan Desa Wisata Kuin Utara mendorong ekonomi hasil kearifan lokal dan 12% responden menilai Kebijakan Desa Wisata Kuin Utara tidak mendorong ekonomi hasil kearifan lokal, pada P6 terdapat 80% responden menilai bahwa Kebijakan Desa Wisata Kuin Utara tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi dan 20% responden menilai Kebijakan Desa Wisata Kuin Utara menimbulkan kesenjangan ekonomi, pada P7 terdapat 88% responden menilai bahwa Kebijakan desa wisata Kuin Utara tidak hanya dinikmati masyarakat dari luar wilayah wisata dan 12% responden menilai Kebijakan desa wisata Kuin Utara hanya dinikmati masyarakat dari luar wilayah wisata.

Hasil penelitian pada Tabel 4 turut menunjukkan bahwa persepsi positif tertinggi terkait kemanfaatan ekonomi yaitu responden menilai Masyarakat setempat merupakan penerima manfaat terbanyak yang ditunjukkan melalui persentase 91%, sedangkan untuk persentase terendah yaitu kebijakan Desa Wisata Kuin Utara menimbulkan kesenjangan ekonomi yaitu terdapat 20% responden. Selain itu Tabel 1 menunjukkan bahwa dari total pertanyaan dengan jawaban “Ya/Tidak” yaitu 7 pertanyaan dengan 100 responden, diperoleh jawaban terdapat 606 jawaban “Ya” atau 86,6% dari total pertanyaan, dan 94 jawaban “tidak” atau 13,4% dari total pertanyaan.

Nilai persentase telah diperoleh untuk setiap pertanyaan dan juga untuk keseluruhan jawaban “Ya/Tidak”, tahap tersebut diperlukan untuk menentukan rentang skala persentase, berikut prosesnya:

Nilai jawaban “Ya: : 1

Nilai jawaban “Tidak” : 0

Dikonversi dalam persentase

Jawaban “Ya” : $1 \times 100\% = 100\%$

Jawaban “Tidak” : $0 \times 100\% = 0\%$ (sehingga tidak perlu dihitung)

Perhitungan jawaban “Ya” dari angket:

Jawaban “Ya” rata-rata $86,6/100 \times 100\% = 86,6\%$ atau dibulatkan 87%

Dalam bentuk nominal = 0,87

Dari analisis skala Guttman, hasil yang diperoleh adalah 87% atau dalam bentuk nominal adalah 0,87, berdasarkan interpretasi maka dapat dikatakan persepsi masyarakat terhadap perubahan kebijakan lahan permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara terkait aspek ekonomi tergolong positif.

Berdasarkan interpretasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap perubahan kebijakan lahan permukiman untuk mewujudkan Desa Wisata Kuin Utara dilihat dari aspek ekonomi untuk masyarakat Kuin Utara Kota Banjarmasin. Temuan penelitian ini menggambarkan adanya optimisme yang tinggi di kalangan masyarakat terkait potensi peningkatan ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengembangan Desa Wisata Kuin Utara. Masyarakat memandang bahwa perubahan kebijakan ini dapat menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Nilai 0,87 pada skala Guttman memperlihatkan tingkat persetujuan yang kuat di antara responden tentang manfaat ekonomi yang diharapkan dari pengembangan wisata di wilayah mereka.

Secara lebih spesifik, data penelitian menunjukkan bahwa persepsi positif tersebut terutama didasarkan pada harapan akan munculnya diversifikasi sumber pendapatan dari sektor pariwisata yang sebelumnya tidak tersedia. Masyarakat melihat adanya potensi untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah seperti kuliner, kerajinan, penginapan, serta jasa pemandu wisata yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk setempat. Tingginya nilai persepsi positif ini juga mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa pengembangan Desa Wisata Kuin Utara akan mendatangkan investasi yang dapat memacu pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata.

Hasil penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melanjutkan implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Kuin Utara. Dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi, khususnya dari perspektif ekonomi, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan dengan dukungan penuh dari masyarakat lokal. Namun demikian, perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat agar mereka dapat memaksimalkan peluang ekonomi yang muncul, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh dapat terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, transformasi Kuin Utara menjadi desa wisata dapat benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi penduduk setempat sebagaimana yang mereka harapkan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis skala Guttman, diperoleh hasil sebesar 87% (0,87) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Kuin Utara terhadap perubahan kebijakan lahan permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara tergolong positif. Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat menerima dan mendukung kebijakan tersebut dari segi dampak ekonomi. Tingkat persetujuan yang tinggi ini dapat diindikasikan sebagai bentuk optimisme masyarakat terhadap potensi peningkatan pendapatan, lapangan

kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang dihasilkan dari pengembangan desa wisata.

Tingginya persepsi positif masyarakat yang mencapai 87% (0,87) terhadap perubahan lahan permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara dalam aspek ekonomi mengindikasikan adanya penerimaan yang kuat dari penduduk setempat. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata umumnya dipandang sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. Persepsi positif tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat terhadap peluang diversifikasi pendapatan melalui usaha penunjang pariwisata seperti kuliner tradisional, kerajinan tangan, penginapan, dan jasa pemandu wisata. Selain itu, masyarakat juga melihat potensi peningkatan nilai properti dan perputaran ekonomi yang lebih dinamis sebagai konsekuensi dari transformasi kawasan mereka menjadi destinasi wisata.

Namun, meskipun persepsi masyarakat secara umum positif, perlu dicermati bahwa 13% sisanya mungkin masih memiliki keraguan atau penolakan terhadap kebijakan ini. Kelompok ini bisa berasal dari masyarakat yang bergantung pada sektor tradisional (seperti perikanan atau pertanian) atau mereka yang khawatir akan dampak negatif seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, perubahan struktur sosial, atau ketidakpastian jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan desa wisata bersifat inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa persepsi positif yang tinggi ini juga membawa tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan. Harapan ekonomi yang tinggi harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kekecewaan jika hasil yang diperoleh tidak sesuai ekspektasi. Pemerintah dan stakeholder terkait perlu merancang strategi pengembangan yang inklusif untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang merata di

kalangan masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada kelompok atau individu tertentu. Program peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk lokal dalam mengelola usaha pariwisata juga menjadi krusial untuk memaksimalkan dampak positif ekonomi dari Desa Wisata Kuin Utara. Dengan demikian, persepsi positif yang telah terbangun dapat dipertahankan dan ditingkatkan seiring dengan implementasi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Dari sudut pandang ekonomi rural, persepsi positif masyarakat ini dapat dikaitkan dengan harapan akan terbukanya peluang usaha baru, seperti homestay, kuliner khas, penyewaan perahu, atau penjualan cenderamata. Sektor pariwisata sering kali menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas, sehingga masyarakat mungkin melihat kebijakan ini sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, keberadaan desa wisata dapat menarik investasi dan kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya berdampak pada perputaran uang di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata umumnya diterima baik oleh masyarakat jika disertai dengan manfaat ekonomi yang nyata. Namun, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas implementasi, termasuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pembagian manfaat yang adil, serta mitigasi dampak negatif. Jika pemerintah dapat memastikan transparansi dan partisipasi aktif warga, maka tingkat penerimaan masyarakat yang sudah tinggi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Pengamatan langsung di Kelurahan Kuin Utara mengungkapkan adanya revitalisasi ekonomi lokal yang nyata, dengan munculnya berbagai usaha kuliner tradisional seperti jajanan pasar terapung dan olahan ikan sungai, serta sentra kerajinan tangan khas Banjar. Peneliti mengamati aktivitas jual beli yang meningkat di sepanjang tepian sungai, didorong oleh kunjungan wisatawan yang menikmati suasana permukiman tradisional

dengan rumah-rumah panggung. Selain itu, terlihat pula inisiatif masyarakat dalam menawarkan jasa penyewaan perahu untuk susur sungai dan penginapan homestay yang dikelola oleh warga setempat, mengindikasikan diversifikasi sumber pendapatan baru yang sebelumnya tidak tersedia secara masif. Namun, pengamatan juga menunjukkan bahwa kenaikan nilai properti di beberapa area strategis wisata turut memicu kekhawatiran gentrifikasi, di mana lahan permukiman tradisional bertransformasi menjadi fasilitas pendukung wisata yang mayoritas dikelola oleh investor luar.

Lebih lanjut, observasi lapangan juga memperlihatkan kompleksitas persepsi masyarakat terkait dampak sosial dari pengembangan desa wisata. Meskipun ada optimisme ekonomi, kekhawatiran terkait pengalihan fungsi lahan dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial masih terlihat. Peneliti mengamati adanya pergeseran pola pemanfaatan ruang, dengan beberapa lahan permukiman diubah menjadi fasilitas pariwisata, yang terkadang menimbulkan dilema antara modernisasi infrastruktur dan upaya mempertahankan otentisitas lingkungan serta budaya setempat. Di sisi lain, pengamatan juga mengkonfirmasi adanya adaptasi positif dari komunitas lokal, seperti partisipasi aktif dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan upaya pelestarian nilai-nilai budaya Banjar sebagai daya tarik wisata. Temuan ini menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang intensif dan pendekatan partisipatif dari pemerintah, sebagaimana yang juga disarankan oleh hasil survei.

Selain itu, pengamatan langsung juga menangkap nuansa kekhawatiran masyarakat terkait pengalihan fungsi lahan dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial. Ada potensi ketegangan antara tuntutan modernisasi infrastruktur wisata dengan upaya mempertahankan otentisitas lingkungan dan budaya setempat dimana persepsi mengenai distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata di antara berbagai segmen masyarakat termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Perlunya inisiatif positif dari komunitas lokal, Pokdarwis, koperasi usaha wisata, dan pelatihan

keterampilan pariwisata yang melibatkan generasi muda setempat, yang menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan dan partisipasi aktif mereka dalam pengembangan desa wisata.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan dukungan empiris bahwa kebijakan perubahan lahan permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara telah mendapatkan respons positif dari masyarakat dalam aspek ekonomi. Namun, untuk memastikan keberlanjutannya, perlu ada evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi riil yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan manfaat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berhenti pada tingkat persepsi positif, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kuin Utara secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis skala Guttman yang menunjukkan persepsi positif masyarakat (87%) terhadap kebijakan perubahan lahan permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum mendukung kebijakan ini dari aspek ekonomi. Persepsi masyarakat terhadap perubahan kebijakan lahan permukiman menjadi Desa Wisata Kuin Utara terkait aspek ekonomi tergolong positif. Angka ini mencerminkan optimisme mayoritas masyarakat terhadap potensi peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang dihasilkan dari pengembangan desa wisata melalui sektor pariwisata. Dukungan ini didorong oleh harapan akan peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Namun, masih terdapat sebagian kecil masyarakat (13%) yang mungkin merasa ragu atau khawatir terhadap dampak kebijakan, terutama kelompok yang bergantung pada mata pencaharian tradisional. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat jika diimplementasikan secara inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memaksimalkan manfaat dan mengatasi tantangan, pemerintah perlu memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan desa wisata, termasuk memberikan pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan bagi UMKM lokal. Selain itu, diperlukan monitoring berkala untuk mengevaluasi dampak ekonomi riil, seperti penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, serta mengidentifikasi kelompok yang belum merasakan manfaat kebijakan. Studi lanjutan dengan pendekatan mixed-methods (kuantitatif dan kualitatif) juga disarankan untuk memahami lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat serta strategi adaptasi ekonomi di tingkat rumah tangga.

Dengan demikian, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat jika diimplementasikan secara inklusif dan berkelanjutan, dengan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan, serta evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi riil yang dirasakan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan baik melalui kuisioner ataupun pengamatan langsung, maka disarankan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin agar persepsi masyarakat yang optimis terhadap kebijakan yang ada dapat semakin dapat ditindak lanjuti, mengingat masyarakat secara signifikan merasakan dampak positif di berbagai bidang. Tindak lanjut dapat dilakukan dengan penguatan pendampingan pada pengelolaan Desa Wisata sehingga setiap tahun terjadi peningkatan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, S., & Zikri, A. (2023). Kajian Awal Persepsi Masyarakat Desa Pematang Sapang Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Menuju Desa Wisata Rintisan. *PAKDEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 11-20.

- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenamaedia Group.
- Creswell, John, (1994), *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, London: SAGE Publications
- Emzir. (2009). "Metodologi penelitian pendidikan", Jakarta. Pt Raja Grafindo Persada
- Fadil, H. N. (2019). *Persepsi mahasiswa IAIN Metro terhadap bisnis multi level marketing PT Melia Sehat Sejahtera (Studi pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Hamidah, S., Kursiah, R. and Muzdalifah, S., (2022). Conflict Management Effectiveness: A Case Study in Determining the Status Quo of Sultan Suriansyah's Tomb in Indonesia. *International Journal of Southeast Asian Studies (IJSAS)*, 2(1), pp.18-22.
- Hikmah, N., & Rabiah, A. S. (2021). Modal sosial dalam pengembangan desa wisata di Kawasan Banjarmasin. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 12(1), 79-92.
- Irwanto. (2002). *Psikologi umum*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Kurniati, P. S., Zakiyani, S. N., Yuwono, F. A. N., & Munigar, W. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Di Wilayah Kota Bandung. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 1-16.
- Murti, C., & Zulkifli, Z. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Kuin di Banjarmasin. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 4(2), 118-129.
- Muttaqin, M. Z. H., Azizi, A., Rasyidi, M., Saputra, M. Y., & Almahera, A. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Ekowisata Di Kecamatan Batukliang Utara. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 365-378.
- Nisa, K., & Haryanto, R. (2020). Kajian persepsi masyarakat terhadap pengembangan kawasan wisata berbasis komunitas di Banjarmasin. *Jurnal Pengembangan Kota*, 8(1), 37-47.
- Prasetyo, A. (2017). Kajian gentrifikasi di kawasan wisata tepi sungai Kalimantan: Studi kasus kampung Kuin, Banjarmasin. *Jurnal Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, 17(1), 15-27.
- Prayitno, A. (2024). Urgensi Program Gerakan Literasi Desa Di Indonesia. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 99-126.
- Purnamawati, N., & Fauzi, E. A. (2024). Strategi komunikasi dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat di pemilihan kepala desa puntik dalam di kecamatan mandastana kabupaten barito kuala: strategi komunikasi dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat

- di pemilihan kepala desa puntik dalam di kecamatan mandastana kabupaten barito kuala. *Kaganga komunika: Journal of Communication Science*, 6(1), 137-149.
- Samodra, G., & Pratomo, A. (2021). Kesiapan masyarakat Kuin dalam pengembangan kampung wisata sungai berbasis budaya lokal di Banjarmasin. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 5(1), 69-76.
- Saputra, E., & Nurzaman, A. (2017). Pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pendapatan masyarakat di desa wisata tradisional. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 12(1), 13-29.
- Sari, N. I., & Suprajaka. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dari perspektif governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 159-173.
- Sari, S. R., Harani, A. R., & Werdiningsih, H. (2016). Pelestarian dan pengembangan kawasan Kampung Lama sebagai landasan identitas permukiman kota Banjarmasin. *MODUL*, 16(1), 43-48.
- Senja, M. N., & Susilowati, I. (2020). Transformasi kawasan kampung tradisional menjadi destinasi wisata pesisir di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 368-376.
- Situmorang, M., Putra, T., & Pasaribu, P. (2023). Persepsi Masyarakat Desa Bagot terhadap Desa Wisata Bagot di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 1(3), 150157.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: : Alfabeta.
- Tholhah, T., & Alamari, M. F. (2022). Strategi Peningkatan Wisatawan Asing Di Kota Cimahi Pada Tahun 2023. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 123-137.